

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 11, Desember 2023

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10314539)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10314539>

Penerapan *E-Government* Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat Melalui Website Simaju Jabar

Muthi Janatun¹, Mohammad Ichsan Abdillah², Ivan Darmawan³^{1,2,3}Universitas PadjadjaranEmail korespondensi: muthi20001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan implementasi e-government BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Barat di bidang KESBAK melalui situs web SIMAJU JABAR. Salah satu cara penerapan *e-government* adalah melalui pembuatan situs web ini. *E-government* merupakan inovasi pemerintah dalam pelaksanaan segala bentuk kebijakan untuk memberikan layanan publik. Namun masih ada banyak masalah dengan implementasi situs web, yakni kurangnya tenaga ahli SDM dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan *website*. Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data sehingga dapat dikatakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa meskipun implementasi situs web SIMAJU JABAR oleh BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Barat di bidang KESBAK telah berjalan cukup baik, namun masih kurangnya sosialisasi dengan fitur terbaru pada website serta kurangnya kurangnya tenaga ahli SDM dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan *website* dikarenakan sudah tidak muda lagi sehingga diperlukan inisiatif dari elemen dukungan, kualitas dan nilai. Peneliti menyarankan peningkatan sosialisasi mengenai fitur terbaru pada *website* kepada para pengguna, serta dapat dilakukan melalui reward system bagi para pengguna yang aktif menggunakan fitur-fitur terbaru pada *website*, sehingga mendorong adanya inisiatif dan motivasi dari para pengguna.

Kata kunci: *E-Government*, *Website SIMAJU JABAR*, *KESBAK*, *BAKESBANGPOL*, *Inovasi*

Article Info

Received date: 26 November 2023

Revised date: 30 November 2023

Accepted date: 06 December 2023

PENDAHULUAN

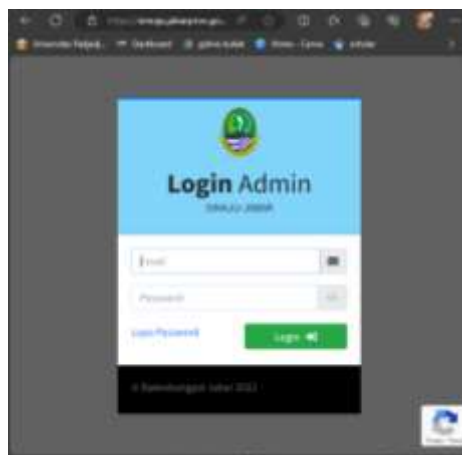
Provinsi Jawa Barat, yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, telah berubah seiring dengan demokratisnya daerah. Banyak organisasi masyarakat (OMS) yang berbasis di daerah ini, dan mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai jenis OMS yang berkembang dan berubah di seluruh provinsi. Organisasi-organisasi ini mewakili berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Fungsi organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam demokrasi yang dinamis.

Organisasi ini merupakan salah satu pilar masyarakat demokratis yang harus sama kuat dan bersemangat seperti pemerintah dan sektor swasta. Dengan demikian, perkembangan ormas di Provinsi Jawa Barat mencerminkan dinamika demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial di daerah tersebut. Seiring dengan perkembangan era digital, penerapan e-government menjadi sangat penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.

Istilah "*e-government*," atau "pemerintahan elektronik," menggambarkan proses penyediaan layanan publik bagi penduduk suatu negara atau wilayah melalui penggunaan alat komunikasi teknologi seperti komputer dan Internet. Tujuan dari *e-government* meliputi peningkatan partisipasi warga negara, efisiensi, dan transparansi. *E-government* mencakup

berbagai fungsi dan layanan, termasuk penyampaian layanan dan informasi pemerintah secara elektronik sepanjang waktu, tujuh hari per minggu.

Terkait hal tersebut, salah satu organisasi pemerintah yang mengelola persyaratan administrasi ormas yang berada di bawah lingkup bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi (KESBAK) adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Jawa Barat. Bidang KESBAK yang terdiri dari pendataan, pengarsipan, dan verifikasi organisasi yang telah mendaftarkan keberadaannya ke BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Barat, sangat penting bagi kelancaran proses administrasi. Bidang KESBAK di kantor BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Barat selalu melakukan pencatatan secara manual dengan menggunakan berkas dokumen fisik yang secara eksklusif berisi informasi tentang ormas di Jawa Barat. Maka KESBANGPOL Provinsi Jawa Barat membuat situs web resmi yang bernama SIMAJU JABAR. Website SIMAJU JABAR merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Ormas Juara Jawa Barat. Website ini menyediakan informasi terkait dengan organisasi masyarakat (ormas) di Provinsi Jawa Barat. Situs web tersebut dapat diakses melalui simaju.jabarprov.go.id.



Gambar 1. Tampilan Website SIMAJU JABAR

Website SIMAJU JABAR merupakan salah satu implementasi dari e-government yang dikelola oleh Bidang Kesbak Kesbangpol Jabar dari 2022 dan baru dikembangkan per Agustus 2023. Namun demikian masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasinya yakni:

1. Tampaknya ada kekurangan kreativitas dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Kesbak Bakesbangpol Jawa Barat untuk memperkenalkan situs web dan manfaat fitur baru dari website ini, terutama mengingat yang menjadi sasaran pengguna adalah Ormas
2. Bakesbangpol Jawa Barat Bidang KESBAK terlihat kurangnya tenaga ahli dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan website.
3. Masih banyaknya ormas yang mengunjungi Kantor Bakesbangpol Jawa Barat untuk mendapatkan layanan secara langsung.

Terlihat dari uraian sebelumnya bahwa masih banyak permasalahan pada penggunaan objek aplikasi SIMAJU JABAR untuk implementasi *e-government*. Oleh karena itu, Bidang Kesbak Bakesbangpol Jawa Barat harus melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Penelitian terkait e-government ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui sejauh mana Bidang Kesbak Bakesbangpol Jawa Barat dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya.

E-Government merupakan penjabaran nilai-nilai sektor publik pada suatu cara yang tersistem guna mempermudah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan juga mengkolaborasikan setiap kepentingan stakeholder (Flak et al., 2009). Selanjutnya menurut

Clay G Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, *e-Government* adalah suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah agar lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, sehingga fasilitas layanan terhadap masyarakat meningkat dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.. dalam buku (Indrajit et al., 2005) *E-Government In Action* menguraikan *e-Government* merupakan suatu usaha dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah agar sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah stakeholder yang memiliki kepentingan.

Adapun beberapa manfaat dan tujuan *e-government* diantaranya, yaitu : 1) Meningkatkan efisiensi pemerintah, 2) memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, 3) memberikan akses informasi kepada masyarakat secara luas, 4) membuat tata kelola pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan terhadap publik. (Junaidi, 2005).

Ada empat level aktivitas dalam upaya pengembangan *e-government*, diantaranya yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan yang diawali dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, dasar kebijakan, kerangka situs terhadap stakeholder, dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan konsep *e-government* itu sendiri. Tahap kedua usaha pematangan, yaitu pembuatan situs informasi publik ditingkatkan agar lebih menarik, mensinergikan isi dari produk informasi dan pelayanan dengan lembaga lain. Masyarakat dapat mengakses informasi, situs-situs transaksi disatukan, dan interoperabilitas data dan aplikasi melalui institusi lain dirangkai dalam tahap ketiga, stabilisasi, yang merupakan peningkatan ke arah yang lebih baik sehingga komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan ini dapat terjalin. Pemanfaatan melalui penggunaan layanan internet merupakan tahap terakhir. Pengembangan aplikasi yang mencakup komponen-komponen yang terkait dengan fase G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*), dan G2C (*Government to Citizen*) juga berjalan beriringan dengan tahapan ini.

Selain itu menurut (Indrajit, 2002), untuk mengimplementasikan keilmuan digitalisasi dalam pemerintahan maka perlu memperhatikan 3 (tiga) faktor elemen ataupun indikator sukses dari *e-government* yakni:

1. *Support Element*

Dukungan adalah komponen kunci dalam pengembangan *e-government*. Ketika pejabat publik memberikan kebijakan yang mendorong penerapan konsep *e-government*, maka dukungan ini terkait dengan kebijakan tersebut. Dorongan yang dimaksud adalah upaya para pemangku kepentingan untuk menciptakan *e-government*, seperti konsensus tentang prinsip-prinsip dasar *e-government*, yang sangat penting bagi keberhasilan pemerintah dalam memenuhi visi dan misinya. Selanjutnya, diperlukan sosialisasi yang komprehensif, berkesinambungan, dan teratur kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.

2. *Capacity Element*

Agar pengembangan *e-government* dapat direalisasikan, kapasitas sangatlah penting. Tiga persyaratan harus dipenuhi untuk mempercepat implementasi konsep *e-government*: sumber daya keuangan yang memadai; infrastruktur informasi dan teknologi yang sesuai; dan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan konsep *e-government* dengan cara yang memaksimalkan kegunaannya.

3. *Value Element*

Nilai adalah komponen manfaat atau kegunaan yang diterima pemerintah dari menawarkan layanan *e-government* kepada masyarakat umum. Sejauh mana masyarakat mendapatkan manfaat dari *e-government* ditentukan oleh faktor ini. Oleh karena itu, ketepatan sasaran perlu diperhitungkan ketika memutuskan proyek mana yang harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik perolehan sampel secara purposive sampling dengan cara mengumpulkan data melalui aktivitas awal observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah satu orang yaitu Budi Setiawan sebagai salah satu pegawai Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat yang mengembangkan website SIMAJU JABAR tersebut. Kemudian di akhir peneliti melakukan proses validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan faktor-faktor keberhasilan dalam kesuksesan e-government yang dikemukakan oleh Indrajit untuk memecahkan fenomena yang muncul dalam implementasi e-government melalui website SIMAJU JABAR oleh BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Barat Bidang KESBAK. (1) Support Element (dukungan); (2) Capacity element (Kapasitas); dan (3) Value element (Nilai) merupakan tiga komponen keberhasilan. Analisis tambahan dari temuan-temuan tersebut disajikan dalam uraian berikut ini untuk setiap elemen:

1. *Support Element* (dukungan)

Dukungan merupakan prioritas yang perlu dilihat dalam berhasil atau tidaknya penerapan Website SIMAJU JABAR. Di dalam penelitian lapangan peneliti mengembangkan melalui beberapa sub elemen penilaian yakni komitmen pemerintah, inovasi dan sosialisasi

a. Komitmen Pemerintah

Dari hasil wawancara dapat ditemukan bahwa komitmen pemerintah yakni bidang Kesbak Bakesbangpol Jabar baik dalam penerapan Website SIMAJU JABAR masuk kedalam visi misi dari Bidang Kesbak Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat karena penganggaran untuk pembuatan serta pengembangan Website SIMAJU JABAR tertuang dalam DPA Bakesbangpol Tahun 2023. Selain itu, Website SIMAJU JABAR ini dibentuk sebagai output dari Diklat Team 3 Kepala Bidang Kesbak Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.

b. Inovasi

Dari hasil wawancara mengenai inovasi Bidang Kesbak Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam meluncurkan Website SIMAJU JABAR sudah baik karena Website ini baru dikembangkan per Agustus 2023 supaya memudahkan Organisasi Masyarakat untuk mengakses dan memantau data ormas se Jawa Barat. Ormas yang biasanya mengajukan SKT menggunakan dokumen fisik yang dibawa ke kantor Bakesbangpol Jawa Barat, kini dengan Website SIMAJU JABAR hanya memakai dokumen yang di upload filenya ke website tersebut. Paling sedikit satu kali dalam 6 bulan, ormas melaporkan melalui Website SIMAJU JABAR ini terkait dengan kegiatan dan data yang ormas miliki.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam pengenalan Website SIMAJU JABAR kepada sasaran layanan yakni Organisasi Masyarakat. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sosialisasi Website SIMAJU ini sudah dijadikan sebagai agenda rutin setiap berkegiatan, baik kegiatan terkait dengan ormas maupun diluar kaitannya dengan ormas, selalu masuk dalam pemaparan supaya targetnya tercapai. Namun, karena baru dikembangkan dengan fitur baru, maka belum semua tersosialisasikan dengan fitur baru.

2. *Capacity Element* (Kapasitas)

Kapasitas merupakan suatu ukuran kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai upaya pemenuhan kebijakan. Dalam penilaian kapasitas penerapan website SIMAJU JABAR oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Peneliti membaginya menjadi sub elemen diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya anggaran.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat. Dari hasil temuan kami berdasarkan wawancara bahwa Bakesbangpol Jawa Barat ada 6 (enam) orang tenaga IT (Informasi Teknologi) yang berkompeten dalam mengatasi gangguan dan mampu mengoperasikan website SIMAJU JABAR. Sehingga kemampuan sumber daya manusia dalam Bakesbangpol cukup memadai. Namun demikian terdapat tantangan lainnya dimana beberapa sumber daya manusia di dalamnya sudah tidak muda lagi sehingga sedikit kesulitan dalam mengoperasikan website tersebut.

b. Sumber daya teknologi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan pengguna website SIMAJU JABAR diketahui bahwa ada 11 fitur yang telah dikembangkan dan sedang dilakukan proses sosialisasi, selain itu rencananya akan terus melakukan pengembangan *website* SIMAJU ini agar semakin baik lagi. Hal ini tentunya menandakan bahwa sarana teknologi website SIMAJU JABAR sudah siap untuk digunakan.

c. Sumber daya anggaran

Anggaran juga merupakan bagian yang tidak kalah penting bagi Bakesbangpol dalam melaksanakan konsep *e-government* agar berjalan dengan baik. Dari data yang kami dapatkan bahwa sejak awal munculnya *website* SIMAJU JABAR, secara konsisten Bakesbangpol selalu mengalokasikan untuk perbaikan maupun pengembangan dan pemeliharannya.

3. *Value Element* (Nilai)

Nilai merupakan kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai penerima layanan dari *Website* SIMAJU JABAR. Dari data observasi dan hasil wawancara kepada informan sebagai objek yang mengelola *Website* SIMAJU JABAR memperoleh hasil bahwa website ini memiliki manfaat yang besar bagi Pemerintah yaitu Bakesbangpol bidang Kesbak dan ormas, karena secara waktu lebih efisien, tidak lagi menerima tamu secara langsung yang akan memakan waktu. Selain itu, dalam monitoring ormas, Bidang Kesbak Bakesbangpol Jabar lebih mudah dalam pengenalan jumlah ormas se Jawa Barat, dan data-data lainnya yang masuk ke dalam *Website* SIMAJU JABAR. Selain itu, dalam website SIMAJU JABAR ada fitur *Frequently Asked Questions* (FAQ), sehingga dalam menjawab pertanyaan pun lebih efisien dan terjawab dengan cepat dengan tidak harus mendatangi Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat secara langsung.

SIMPULAN

Dari penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara serta pengumpulan dokumen yang telah dilaksanakan maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. *Support Element* (dukungan) disimpulkan sudah terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya komitmen pemerintah yakni bidang Kesbak Bakesbangpol Jabar baik dalam penerapan *Website* SIMAJU JABAR masuk ke dalam visi misi dari Bidang Kesbak Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
2. *Capacity Element* (Kapasitas) disimpulkan bahwa dari sub element sumber daya manusia di Bakesbangpol JABAR sudah terpenuhi dibuktikan dengan adanya 6 (enam) orang

tenaga IT (Informasi Teknologi) yang berkompeten dalam mengatasi gangguan dan mampu mengoperasikan website SIMAJU JABAR selain itu Bakesbangpol juga melakukan penganggaran untuk pembuatan serta pengembangan Website SIMAJU JABAR tertuang dalam DPA Bakesbangpol Tahun 2023.

3. *Value Element* (Nilai) disimpulkan bahwa Bakesbangpol Jawa Barat melalui website SIMAJU JABAR berhasil memberikan manfaat besar bagi Pemerintah yaitu khususnya Bakesbangpol bidang Kesbak dan ormas, karena secara waktu lebih efisien, tidak lagi menerima tamu secara langsung yang akan memakan waktu dalam mendata dan memonitoring jumlah ORMAS se Jawa Barat.

Berdasarkan kesimpulan terhadap setiap sub elemen dalam keberhasilan penerapan konsep *e-government* dalam inovasi website SIMAJU JABAR oleh Bakesbangpol Jawa Barat agar melakukan sosialisasi dan membuat petunjuk atau tutorial dalam pengoperasian website tersebut agar bagi sumber daya manusia yang lebih tua dapat mengikutinya dengan mudah. Peneliti juga memberikan rekomendasi bagi peneliti lainnya agar menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan selain itu penggunaan variabel yang berbeda juga disarankan agar memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan memiliki manfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam penerapan konsep *e-government*.

Referensi

- Bapenda.Jabar. (2015). Mempersiapkan Masyarakat untuk Era E-government. BAPENDA JABAR (jabarprov.go.id). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. Retrieved from <https://bapenda.jabarprov.go.id/2015/09/04/mempersiapkan-masyarakat-untuk-era-e-government/>
- Bakesbangpol_Jabar. (2022). SIMAJU (SISTEM INFORMASI ORMAS JUARA). Youtube. Retrieved form <https://www.youtube.com/watch?v=LobCwQfWqmkGanjar>, H. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sociologlobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Volume 1 No.1 Desember 2016. DOI: 10.24198/jsg.v1i1.11185
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi Offset.
- Indrajit, R. E. (2005). *E-Government In Action*. Andi Offset.
- Manoharan, Aroon P.; Melitski, James; Holzer, Marc (20 January 2022). "Digital Governance: An Assessment of Performance and Best Practices". *Public Organization Review*. 23 (1): 265–283. doi:10.1007/s11115-021-00584-8. ISSN 1573-7098. PMC 8769785
- Open data jabar. (et al). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (jabarprov.go.id). Retrieved from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/organisasi/badan-kesatuan-bangsa-dan-politik>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
- Spithoven, Antoon (2012). "Public governance of healthcare in the United States: a transaction costs economics (TCE) analysis of the 2010 reform". *Journal of Institutional Economics*. 8 (4): 429–457. doi:10.1017/S1744137412000082. S2CID 202338043.
- Scott, M., DeLone, W., & Golden, W. (2016). *Measuring eGovernment success: a public value approach*. *European Journal of Information Systems*, 25(3), 187–208.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44–58.
- Surendro, K. (2009). Implementasi tata kelola teknologi informasi (Cetakan I). Informatika.
- Usaid. (et al). USAID Madani: Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil. Retrieved from <https://www.usaid.gov/id/indonesia/fact-sheets/strengthening-civil-society-organizations>